

Ekonomi Sumber Daya Manusia

Rossanto Dwi Handoyo, SE, M.Si.



PENDAHULUAN

Sebagian besar para ekonom menelaah ekonomi kesejahteraan (*welfare Economics*) lebih banyak terpusat pada pasar tenaga kerja. Bagaimana proses bekerjanya pasar tenaga kerja yang mampu membantu menentukan tingkat kesejahteraan umat manusia. Jenis barang apa yang dapat dipenuhi untuk dikonsumsi, siapa saja yang akan mengonsumsi, di mana kita ambil kesempatan untuk berlibur, di sekolah mana anak-anak kita akan sekolah, dan semua hal yang bisa meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Ekonomi Sumber Daya Manusia (baca: ekonomi ketenagakerjaan) mempelajari bagaimana pasar tenaga kerja bekerja.

Ketertarikan kita pada pasar tenaga kerja cenderung meningkat. Hal ini karena adanya kepentingan kita sendiri dan juga karena banyak isu-isu yang menjadi perdebatan berkaitan dengan kebijakan di bidang sosial yang bisa mempengaruhi pasar tenaga kerja khususnya pada sekelompok tenaga kerja tertentu. Atau pertanyaan yang banyak menyangkut mengenai hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan perusahaan.

Ekonomi sumber daya manusia (ketenagakerjaan) didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia baik perorangan maupun agregatif dalam usahanya memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil jerih payahnya di pasar tenaga kerja. Di sisi lain juga akan dibahas tentang bagaimana perilaku pengusaha perorangan maupun secara agregatif dalam usahanya memperoleh pekerja yang sesuai dengan kebutuhannya dan tetap didasarkan atas pertimbangan memperoleh laba ataupun keuntungan optimal (kerugian minimal).

Di antara isu-isu kebijakan yang akan dipelajari dalam ekonomi ketenagakerjaan modern adalah:

1. Apa yang menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat secara signifikan pada awal abad yang lalu di beberapa negara industri maju?
2. Apa dampak dari imigrasi terhadap upah dan kesempatan kerja bagi pekerja pribumi?
3. Apakah upah minimum mampu meningkatkan tingkat pengangguran dari pekerja tidak terlatih?
4. Apakah subsidi upah dan pajak membuat perusahaan dapat meningkatkan tingkat kesempatan kerja?
5. Apa dampak keselamatan kerja dan aturan kesehatan bagi kesempatan kerja dan pendapatan?
6. Apakah subsidi pemerintah bagi investasi modal sumber daya manusia dari pekerja yang tidak memiliki keunggulan merupakan suatu cara yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja perekonomian?
7. Mengapa ketidakseimbangan upah meningkat pesat di Amerika Serikat selama tahun 1980-an dibandingkan dengan di negara maju lainnya?
8. Apa dampak program aksi afirmatif pada pendapatan tenaga kerja wanita dan kalangan minoritas?
9. Apa dampak ekonomi dari perserikatan pekerja baik untuk anggotanya maupun bagi perekonomian secara keseluruhan?

Setelah mempelajari modul ini secara umum Anda diharapkan dapat menjelaskan konsep ekonomi kesejahteraan dalam kaitannya dengan kesejahteraan tenaga kerja.

Selanjutnya secara khusus Anda diharapkan dapat menjelaskan:

1. peranan sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan;
2. penduduk sebagai sumber tenaga kerja;
3. konsep tenaga kerja;
4. kondisi ekonomi Indonesia yang mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja;
5. konsep pengangguran dan kategorinya;
6. permasalahan tenaga kerja di Indonesia; dan
7. perilaku pelaku penting dalam pasar tenaga kerja.

KEGIATAN BELAJAR 1**Ekonomi Sumber Daya Manusia dan
Ekonomi Pembangunan****A. HUBUNGAN EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN
EKONOMI PEMBANGUNAN**

Tenaga kerja dalam masyarakat merupakan salah satu faktor yang potensial untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Jumlah penduduk yang besar, seperti Indonesia, Amerika, India, Cina, dan lain sebagainya akan menentukan percepatan laju pertumbuhan ekonomi, baik melalui pengukuran produktivitas maupun melalui pengukuran pendapatan per kapita. Selain itu, kesempatan kerja yang tersedia dan kualitas tenaga kerja yang digunakan akan menentukan proses pembangunan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang dan jasa.

Adanya kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan di satu pihak, dan adanya persediaan/penawaran tenaga kerja di pihak yang lain, mengakibatkan timbulnya pasar tenaga kerja yang merupakan tempat di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja bertemu.

Ekonomi pembangunan sendiri mempunyai sejarah yang unik untuk disimak. Pada awalnya makna pembangunan lebih menitikberatkan kepada aspek ekonomi yaitu kemiskinan. Seiring berjalannya waktu makna tersebut meluas menjadi peningkatan kualitas kehidupan (sering kali pengukuran kualitas ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)). Setidaknya terdapat tiga nilai inti pembangunan yang dapat digunakan untuk memahami nilai pembangunan (Todaro, 1997) yaitu: kecukupan, jati diri dan kebebasan.

Kecukupan di sini tidak hanya merujuk pada makanan saja namun lebih luas lagi. Kecukupan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana tercukupinya semua kebutuhan dasar untuk setiap individu. Apabila kebutuhan dasar ini tidak dapat tercukupi salah satunya, maka muncullah kondisi 'keterbelakangan absolut'. Kecukupan tersebut dipenuhi oleh fungsi dasar perekonomian, yaitu penyediaan perangkat dan sarana untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Atas dasar itu, dapat dinyatakan

bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan.

Sebagai bagian dari sebuah gugusan masyarakat yang universal, sebuah negara atau bangsa memerlukan sikap untuk menghargai diri sendiri, mampu dan perlu untuk mengejar suatu tujuan serta bentuk pernyataan diri yang lain. Pernyataan tersebut dapat dinyatakan dalam sebuah istilah, yaitu 'jati diri'. Pencarian jati diri bagi sebuah negara yang sedang berkembang sangat diperlukan karena proses masuknya informasi dari negara-negara maju akan membuat sebuah negara sedang berkembang kehilangan makna keberadaannya. Bagi sebuah negara kehilangan jati diri merupakan masalah yang sangat besar. Tujuan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan akan berubah apabila sebuah negara kehilangan jati diri. Ekses negatif dari kehilangan itu adalah semakin tingginya sifat dan sikap konsumerisme pada setiap individu dari sebuah negara.

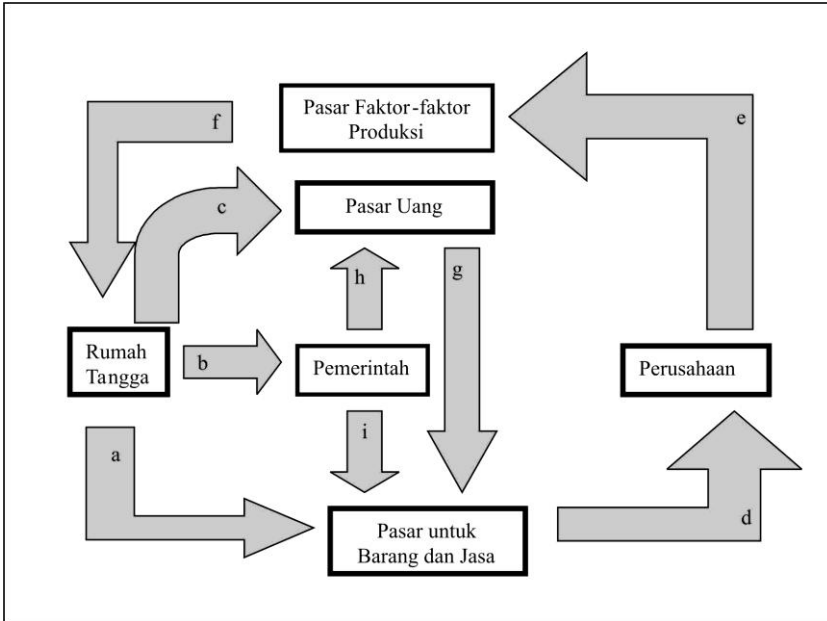
Kehilangan makna atau jati diri juga akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dengan kata lain kebebasan sebuah negara menjadi hilang. Kebebasan dapat diartikan sebagai kemerdekaan individu (negara) dari semua jenis perbudakan maupun penghambaan kepada individu (negara) lain. Kebebasan untuk memilih model atau tujuan pembangunan yang sesuai bagi negaranya.

Dalam kasus permintaan tenaga kerja di negara maju berbeda dengan negara sedang berkembang. Di negara maju, harga pasar untuk tenaga kerja berkisar di atas kebutuhan fisik minimum negara tersebut, namun di negara sedang berkembang apabila harga (upah) disesuaikan dengan kondisi pasar maka pekerja tidak akan dapat memenuhi kebutuhan fisik minimumnya. Kondisi itu *mencerminkan* terjadinya 'keterbelakangan absolut'. Oleh karena itu, di Indonesia muncul kebijakan upah minimum regional maupun provinsi. Kebijakan tersebut sebagai pernyataan sikap dari Pemerintah Indonesia bahwa pemenuhan kebutuhan fisik minimum pekerja merupakan syarat utama bagi kompensasi upah. Apabila mempertimbangkan semua aspek investasi khususnya investasi dari luar negeri, persyaratan tersebut merupakan penghalang, mengingat produktivitas pekerja Indonesia yang masih rendah. Kebijakan itu timbul sebagai akibat kemampuan untuk memahami jati diri yang kemudian diturunkan dalam kebebasan pembentukan tujuan pembangunan.

B. EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDUDUK

Pasar tenaga kerja adalah bagian dari pasar faktor produksi. Setiap unsur pembentuk dalam pasar faktor-faktor produksi tersebut sebagian besar berasal dari sektor rumah tangga yang berupa tanah, keahlian (*skill*), kemampuan manajerial serta modal. Perekonomian merupakan sistem yang dibentuk oleh manusia, sehingga perilaku manusia dicerminkan melalui perekonomiannya. Dalam perekonomian terjadi interaksi antarindividu (manusia) yang berupa aktivitas ekonomi, antara lain: konsumsi, investasi, penawaran tenaga kerja dan lain sebagainya. Besar kecilnya perekonomian ini tergantung kepada kemampuan individu-individu dalam perekonomian untuk memproduksi (produksi tidak hanya merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi barang akhir saja, tetapi produksi merupakan proses pembentukan nilai tambah bagi setiap individu).

Salah satu ukuran penilaian kemampuan produksi menggunakan produktivitas. Secara sederhana, makna produktivitas ini dapat dijabarkan sebagai kemampuan setiap individu untuk melakukan produksi secara optimal. Melalui sudut pandang makro ekonomi, produktivitas diukur dengan menggunakan pendekatan kependudukan. Pengukuran ini melibatkan banyak unsur dalam penduduk (antara lain agama, budaya, unsur geografis, politik, keamanan). Oleh karena itu, sering kali pengukuran produktivitas secara makro menggunakan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan per kapita dari penduduk sebuah negara, maka produktivitas penduduk negara tersebut berarti meningkat.



Sumber: Mankiw, N. Gregory, Teori Makroekonomi edisi kelima (terjemahan), Jakarta.

- Keterangan gambar:
- a) konsumsi rumah tangga
 - b) pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga
 - c) tabungan rumah tangga
 - d) pendapatan yang diperoleh perusahaan
 - e) pembayaran faktor produksi
 - f) pendapatan yang diperoleh rumah tangga
 - g) investasi
 - h) tabungan masyarakat (*public saving*)
 - i) belanja pemerintah

Gambar 1.1.
Siklus dalam Perekonomian

Penduduk merupakan sumber tenaga kerja manusia. Tenaga kerja ini pada umumnya tersedia di pasar kerja, dan biasanya siap untuk digunakan dalam proses produksi sedang penerima tenaga kerja meminta tenaga kerja dari pasar kerja. Apabila tenaga kerja bekerja, maka ia akan memperoleh upah atau gaji, yang merupakan imbalan atas jasanya. Tenaga kerja akan menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya akan dilempar ke pasar barang dan jasa. Di pasar barang dan jasa, timbul permintaan barang dan jasa oleh penduduk. Untuk memperoleh barang dan jasa, penduduk harus membayar harga barang/jasa tersebut. Pembayaran (dalam bentuk uang) oleh penduduk pada umumnya diperoleh dari pendapatannya atas kontribusinya di dalam proses produksi. Sehingga terjadilah arus putar balik dari aliran barang dan jasa serta aliran uang di masyarakat. Pada dasarnya, aliran siklus tersebut akan menyebabkan terjadinya keseimbangan di dalam perekonomian. Namun demikian, suatu saat keseimbangan itu bisa terganggu, yaitu apabila terjadi kejutan (*gangguan/shock*) dari luar (*faktor eksogen*), sehingga keseimbangan dalam siklus perekonomian berubah.

Gambar 1.1 mencoba menjelaskan aliran uang dalam perekonomian. Meskipun urutan keterangan gambar menunjukkan sebuah pola yang urut namun hal itu tidak berarti bahwa perekonomian berawal dari konsumsi (a) dan diakhiri oleh belanja pemerintah (i). Dalam sebuah perekonomian terdapat tiga pelaku ekonomi, yaitu: rumah tangga (*households*), swasta (*private*) dan pemerintah (*government*). Pelaku ekonomi tersebut mempunyai cara yang spesifik dalam memenuhi kebutuhannya (*need*). Rumah tangga membutuhkan konsumsi akan barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pasar untuk barang dan jasa, di mana penawaran atas produk barang dan jasa tersebut disediakan oleh swasta (perusahaan). Perusahaan sendiri membutuhkan faktor-faktor produksi dalam menjalankan usahanya dan penawaran faktor produksi tersebut disediakan oleh rumah tangga. Sementara itu, pemerintah sebagai fasilitator membutuhkan pendapatan untuk memfasilitasi setiap aktivitas ekonomi maupun nonekonomi. Pendapatan itu diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga. Walaupun perusahaan merupakan pelaku ekonomi yang paling “terlihat” aktivitas ekonominya, namun perlu disadari pula bahwa sebenarnya individu di dalam perusahaan merupakan komponen dari rumah tangga. Pajak kemudian disalurkan kepada pasar uang dan pasar untuk barang dan jasa.

C. KONSEP TENAGA KERJA

Konsep tenaga kerja di tiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan yang disebut terakhir yakni pencari kerja, bersekolah dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja tetapi dianggap secara fisik mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja.

Secara praktis, pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tiap-tiap negara memberikan batas umur yang berbeda. India misalnya, menggunakan batasan umur dari 14 tahun sampai dengan 60 tahun. Selain dari umur itu (di bawah 14 tahun dan di atas usia 60 tahun), tidak digolongkan tenaga kerja. Amerika Serikat, mula-mula menggunakan batas umur minimal 14 tahun sampai tanpa batas umur maksimum. Kemudian, sejak tahun 1967, batas umur dinaikkan menjadi 16 tahun. Di Indonesia sendiri, semula dipilih batas umur minimal 10 tahun sampai tanpa batas umur maksimum. Dengan demikian tenaga kerja di Indonesia dimaksudkan sebagai penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih. Pemilihan 10 tahun sebagai batas umur didasari oleh kenyataan bahwa dalam umur tersebut, sudah banyak penduduk terutama di desa-desa yang sudah bekerja di ladang atau sedang mencari pekerjaan.

Seiring dengan meningkatnya dunia pendidikan, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang melakukan kegiatan ekonomi berkurang. Sekarang wajib sekolah 9 tahun telah diberlakukan, maka anak-anak sampai dengan usia 14 tahun akan berada di sekolah, sehingga lebih tepat batas umur dinaikkan menjadi 15 tahun. Atas pertimbangan tersebut, Undang-undang No. 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan telah menetapkan batas usia kerja menjadi 15 tahun. Dengan kata lain, sesuai dengan mulai berlakunya undang-undang ini, mulai tanggal 1 Oktober 1998, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Dan Indonesia tidak menganut batas usia maksimum. Alasannya adalah Indonesia belum mempunyai sistem jaminan nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai swasta. Namun demikian, pendapatan yang diterima pun masih jauh dari

cukup. Oleh sebab itu, bagi mereka yang menginjak masa pensiun tetap harus bekerja. Sehingga mereka digolongkan sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja itu sendiri, terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labor force*, terdiri dari (1) golongan yang bekerja, dan (2) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam angkatan kerja ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering disebut juga angkatan kerja yang potensial (*potential labor force*).

D. KEADAAN DI INDONESIA

Sebelum tahun 1997, Indonesia dikenal sebagai salah satu keajaiban di Asia. Melalui penetapan ketahanan pangan pada pertengahan 1970, kemudian dilanjutkan dengan penancangan proyek-proyek padat karya pada pertengahan tahun 1980, yang akhirnya menuju kemantapan dalam ekspor industri manufaktur di tahun 1990 (BPS-BAPPENAS-UNDP, 2001). Semenjak terjadi krisis, inflasi meningkat dari 6% menjadi 78% sementara upah riil (tingkat upah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi) turun hingga sepertiganya selama tahun 1997 – 1998. Akibatnya terjadi kenaikan proporsi individu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selama tahun 1996 sampai dengan 1999 proporsi individu yang hidup di bawah garis kemiskinan berkisar di antara 18% – 24%. Kebanyakan pekerja pria mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di saat itu, sehingga mendorong pekerja wanita (para istri) untuk bekerja lebih keras (menambah jam kerja). Penurunan Indeks Pembangunan Manusia menjadi sebuah kenyataan yang tidak dapat ditolak. Penurunan tingkat pendapatan riil ditengarai sebagai penyebab yang dominan dalam penurunan ini.

Pola pembangunan yang telah disusun sebelumnya tidak mungkin digunakan pada kondisi semacam ini. Penyusutan lahan pertanian menyebabkan program ketahanan pangan hanya bisa menggunakan prinsip intensifikasi. Perubahan pola padat karya menjadi padat modal mengakibatkan penyerapan tenaga kerja menjadi berkurang. Perkembangan yang terjadi pada dunia kerja membuat pekerja memperkenalkan isu-isu sosial ke dalam pasar kerja. Berkurangnya investasi di Indonesia

menyebabkan tenaga kerja yang belum terserap tidak dapat memasuki pasar kerja. Hal-hal tersebut merupakan perubahan yang terjadi di perekonomian Indonesia. Dalam ringkasan eksekutif Indonesia Human Development Report 2001: *Towards a New Consensus: Democracy and Human Development in Indonesia*, BPS-BAPPENAS-UNDP menawarkan sasaran yang dapat digunakan untuk membuat formulasi baru pembangunan Indonesia, yaitu pembangunan (kualitas) manusia.

Tabel 1.1.
Indikator Ekonomi Terbaru

	2000	2001	2002	2003	2004(a)	2005(b)
GDP (US\$bn)	165,0	164,1	203,8	243,3	257,1	289,7
GDP per capita (US\$)	780	766	939	1.103	1.149	1.276
Real GDP growth (% change YOY)	5,4	3,8	4,3	4,5	4,9	5,4
Current Acc. Balance (US\$m)	7.992	6.900	7.824	7.252	1.184	3.875
Current Acc. Balance (% GDP)	4,8	4,2	3,8	3,0	0,5	1,3
Goods&services exports (% GDP)	41,0	38,2	31,4	29,2	30,7	30,4
Inflation (%change YOY)	3,7	11,5	11,9	6,8	6,1	7,2
Unemployment rate (%)	6,1	8,1	9,1	9,5	9,6	9,4

Sumber: Indonesia Fact Sheet (Australia)

Melalui Tabel 1.1 diketahui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia meningkat menjadi 9,6% dan menurun sampai pada tingkat 9,4% pada tahun 2005 (angka perkiraan). Semenjak tahun 2000, keadaan lapangan kerja di Indonesia semakin memprihatinkan. Kenaikan angka pengangguran terjadi di setiap tahun berjalan. Hal ini nampaknya sejalan dengan penurunan nilai GDP riil Indonesia sampai mencapai *level* di bawah 5% semenjak tahun 2001 hingga tahun 2004.

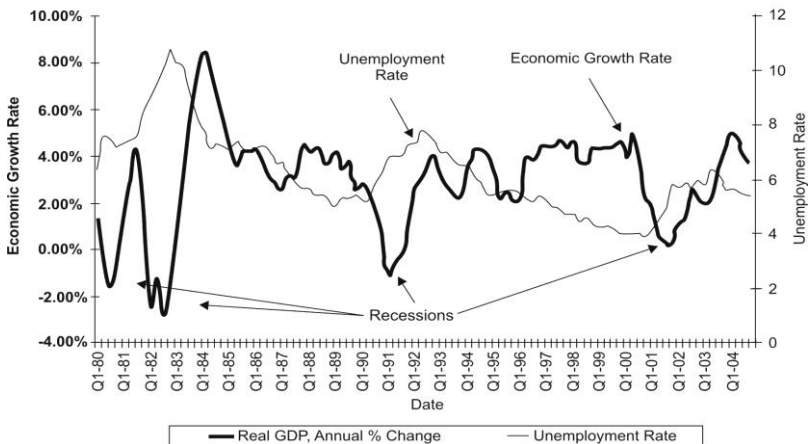
Tabel 1.2.
Negara Tujuan Ekspor Utama Indonesia Tahun 2003

1	Jepang	22,3%
2	Amerika Serikat	12,1%
3	Singapura	8,8%
4	Korea Selatan	7,1%
5	Cina	6,2%
8	Australia	2,9%

Sumber: Indonesia Fact Sheet (Australia)

Nampaknya hal ini sejalan dengan kasus di negara maju seperti Amerika Serikat (lihat Gambar 1.2.). Periode yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan cenderung negatif juga diikuti oleh kenaikan angka pengangguran. Sisi ekspor sebagai salah satu sumber devisa luar negeri juga terpengaruh. Australia sebagai salah satu negara tujuan ekspor utama Indonesia menunjukkan penurunan impor. Minyak mentah sebagai salah satu andalan ekspor Indonesia ke Australia pada tahun 2004 menunjukkan angka 1,2 juta dolar Australia.

Economic Growth Rate (Relative to Same Period Last Year) and the Unemployment Rate



Sumber: www.swlearning.com (13 Mei 2005)

Gambar 1.2.
Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Pengangguran di Amerika Serikat



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Dalam konteks pembangunan manusia, IPM dan jati diri digunakan sebagai ukuran terjadinya peningkatan kualitas hidup, jelaskan!
- 2) Setiap negara mempunyai batasan tersendiri mengenai konsep tenaga kerja. Jelaskan konsep tenaga kerja yang berkaitan dengan batas umur di Indonesia!
- 3) Jelaskan mengapa lebih banyak pengangguran pada angkatan kerja dengan pendidikan tinggi dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Bentuk jati diri dilihat sebagai aspek dari Indeks Pembangunan Manusia yaitu manusia sebagai bagian dari masyarakat suatu negara mempunyai sikap dapat menghargai diri sendiri dan mempunyai kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang telah digariskan sehingga mereka tidak kehilangan makna tentang keberadaannya. Dan yang terpenting manusia sebagai pelaksana pembangunan dapat mengangkat derajat negaranya. Dengan adanya jati diri tujuan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Kita tidak tergantung orang lain dalam melaksanakan tujuan pembangunan. Dalam kaitannya dengan tenaga kerja, contoh di Indonesia adalah pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing berdasarkan perhitungan kebutuhan fisik minimumnya dan penetapan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan negara lain atau negara maju. Walaupun kenyataannya banyak industri yang dimiliki oleh orang asing.
- 2) Konsep tenaga kerja di Indonesia mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja serta mereka yang sedang mencari pekerjaan. Dahulu umur mulai bekerja adalah ≥ 10 tahun. Namun dengan adanya program wajib belajar 9 tahun yang berarti anak-anak sampai dengan usia 15 tahun harus bersekolah, usia minimal bekerja menjadi ≥ 15 tahun.

Sedang untuk usia maksimum bekerja tidak terbatas, karena banyak orang yang sudah mencapai usia pensiun harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya karena uang pensiun yang diterima sangat kecil.

- 3) Pada dasarnya untuk melanjutkan sampai pada jenjang pendidikan tinggi memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setelah lulus tentunya mereka mencari pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Ukuran yang digunakan biasanya upah yang diterima harus seimbang dengan biaya investasi untuk pendidikan tersebut. Sedang bagi masyarakat yang berpendidikan rendah mereka mau menerima pekerjaan apa saja. Mereka tidak terlalu memilih pekerjaan dan tidak menentukan spesifikasi pekerjaan yang diinginkan. Hal ini karena investasi yang ditanamkan untuk meningkatkan keterampilannya kecil sekali sehingga marginal *rates of substitution* menjadi besar.



RANGKUMAN

1. Ekonomi Sumber Daya Manusia (baca: ekonomi ketenagakerjaan) mempelajari bagaimana pasar tenaga kerja bekerja
2. Dalam pasar kerja ada tiga pelaku penting dalam pasar yakni pekerja, perusahaan dan pemerintah. Pekerja memainkan peran utama dalam pasar kerja. Pekerjalah yang memutuskan apakah akan bekerja atau tidak, berapa lama pekerja akan bekerja, keterampilan apa yang dibutuhkan, kapan akan berhenti bekerja, apakah perlu memasuki atau bergabung dengan serikat pekerja yang ada atau tidak, dan seberapa besar usaha yang dilakukan untuk mengalokasikan waktu untuk bekerja atau untuk hal-hal yang lain. Semua keputusan ini didorong oleh keinginan untuk mengoptimalkannya, yakni memilih yang terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia.
3. Secara umum, kurva penawaran tenaga kerja menghubungkan jumlah jam kerja yang ditawarkan dalam pasar tenaga kerja dengan upah yang ditawarkan.
4. Tiga nilai inti pembangunan yang dapat digunakan untuk memahami tujuan pembangunan adalah kecukupan, jati diri dan kebebasan. Tujuan pembangunan Indonesia saat ini ditujukan kepada pembangunan kualitas manusia.

5. Terdapat delapan paradoks masalah ketenagakerjaan dan migrasi di Indonesia Pertama, penduduk semakin banyak bermigrasi ke perkotaan. Kedua, angka pengangguran untuk generasi muda (mereka yang baru lulus sekolah) lebih tinggi daripada usia 30 tahun ke atas. Ketiga, angka pengangguran untuk wanita lebih tinggi daripada pria. Keempat, tingkat pengangguran untuk pekerja yang lebih lama jenjang pendidikan yang ditempuhnya menunjukkan angka pengangguran yang lebih tinggi. Kelima, angka pengangguran untuk mereka yang bersekolah di sekolah umum lebih besar daripada mereka yang bersekolah di sekolah kejuruan. Keenam, performa ekonomi yang bagus, tetapi tidak disertai dengan penyerapan angkatan kerja. Ketujuh, tidak ada perbedaan angka pengangguran antarmasyarakat dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Terakhir, angka pengangguran untuk daerah Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, NTT, Maluku dan Irian Jaya lebih besar daripada provinsi tetangganya NTB, Kalimantan Tengah dan Lampung tanpa ada penjelasan yang masuk akal.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Nilai inti pembangunan yang dikemukakan Todaro yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup minimum adalah
 - A. jati diri
 - B. kecukupan.
 - C. kebebasan
 - D. keberhasilan

- 2) Besarnya kemajuan perekonomian suatu negara salah satunya ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia untuk memproduksi yaitu dalam aspek ...
 - A. proses pembentukan nilai tambah.
 - B. tingginya pendidikan yang dicapai
 - C. penggunaan faktor produksi lain
 - D. penentuan harga jual produk

- 3) Dalam siklus aliran perekonomian, penyediaan faktor produksi tenaga kerja dilakukan oleh
 - A. pemerintah
 - B. pasar kerja
 - C. pengusaha
 - D. rumah tangga

- 4) Dalam konsep tenaga kerja usia maksimum pekerja di Indonesia adalah
 - A. tidak terbatas
 - B. kurang 65 tahun
 - C. usia pensiun
 - D. sekitar 57 tahun

- 5) Terjadinya krisis di Indonesia menyebabkan terjadinya penurunan Indeks Pembangunan Manusia yang diduga disebabkan oleh
 - A. fokus produksi pada intensifikasi
 - B. kurangnya pengembangan karier
 - C. peningkatan jumlah penduduk
 - D. penurunan tingkat pendapatan riil

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Konsep Pengangguran**

Menurut definisi yang diperoleh dari Sensus Penduduk tahun 1971, pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan (namun sensus penduduk tahun 1971 tidak memberikan batasan mengenai jumlah jam kerja per hari atau per minggu). Secara fundamental, fenomena pengangguran di Indonesia pada saat sebelum krisis berbeda dengan negara berkembang lainnya. Di Indonesia, pengangguran yang terjadi pada saat itu adalah angkatan kerja yang mencari pekerjaan (*search unemployment*), sedangkan di negara lainnya pengangguran yang terjadi cenderung disebabkan oleh perekonomian (*structural unemployment*).

Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu pengangguran friksional, struktural dan musiman.

A. PENGANGGURAN FRIKSIONAL

Pengangguran friksional adalah pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Kesulitan temporer ini dapat berbentuk, waktu yang diperlukan selama prosedur pelamaran dan seleksi, bisa terjadi karena faktor jarak atau kurangnya informasi. Di satu pihak pencari kerja tidak hanya sekadar mencari pekerjaan yang dapat memberikan penghasilan tertinggi tetapi juga kondisi kerja terbaik. Proses pemilihan seperti itu memerlukan waktu. Di lain pihak, pengusaha tidak begitu saja mengisi lowongan kerja yang ada dengan orang yang pertama kali datang melamar. Untuk mengisi satu lowongan tertentu, pengusaha cenderung untuk memilih seseorang yang dianggap terbaik di antara calon-calon yang ada. Pengisian lowongan seperti ini memerlukan waktu untuk proses seleksi. Selama proses yang demikian, seorang pelamar yang menunggu panggilan untuk seleksi atau ujian masuk (yang belum pasti diterima) adalah tergolong penganggur friksional.

Pengangguran jenis ini juga bisa terjadi karena kurangnya mobilitas pencari kerja di mana lowongan pekerjaan justru bukan terdapat di sekitar tempat tinggal pencari kerja. Misalnya pencari kerja tinggal di Surabaya, sementara lowongan pekerjaan berada di luar Surabaya. Bentuk yang terakhir adalah, pencari kerja tidak mengetahui di mana tersedianya tenaga-tenaga yang sesuai.

B. PENGANGGURAN STRUKTURAL

Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktural dalam struktur atau komposisi perekonomian. Pengangguran struktural yang demikian memerlukan perubahan dalam keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan sedangkan pihak pencari kerja tidak mampu menyesuaikan dengan keterampilan tersebut. Misalnya terjadi pergeseran dari perekonomian yang agraris menuju perekonomian yang industrial. Di satu pihak, terjadi suatu pengurangan tenaga di sektor pertanian dan di pihak lain bertambahnya tenaga kerja di sektor industri. Akan tetapi, tenaga kerja yang berlebih di sektor pertanian tadi tidak begitu saja dapat terserap di sektor industri, karena sektor industri memerlukan tenaga yang memiliki keterampilan tertentu. Akibatnya tenaga yang berlebih dari sektor pertanian tadi merupakan penganggur struktural.

Bentuk pengangguran struktural yang lain adalah terjadinya pengurangan pekerja akibat penggunaan alat-alat dan teknologi maju. Penggunaan traktor misalnya, dapat menimbulkan pengangguran di kalangan petani. Penganggur sebagai akibat struktur perekonomian pada dasarnya memerlukan tambahan latihan untuk memperoleh keterampilan baru yang sesuai dengan permintaan dan teknologi baru. Lamanya pengangguran struktural pada umumnya lebih panjang dari lamanya pengangguran friksional.

C. PENGANGGURAN MUSIMAN

Pengangguran musiman terjadi karena pergantian musim. Di luar musim panen, para petani banyak yang tidak turun ke sawah. Pada masa ini, banyak orang yang tidak mempunyai kegiatan ekonomis, mereka hanya sekadar menunggu musim yang baru. Selama masa menunggu tersebut, mereka digolongkan sebagai penganggur musiman. Namun dalam sensus penduduk

yakni Survei Penduduk Antarsensus (SUPAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), hal ini tidak terlihat jelas karena mereka menurut definisi digolongkan bekerja.

D. PARA PELAKU DALAM PASAR TENAGA KERJA

Dalam pasar kerja ada tiga pelaku penting dalam pasar yakni pekerja, perusahaan dan pemerintah. Pekerja memainkan peran utama dalam pasar kerja. Pekerjalah yang memutuskan apakah akan bekerja atau tidak, berapa lama pekerja akan bekerja, keterampilan apa yang dibutuhkan, kapan akan berhenti bekerja, apakah perlu memasuki atau bergabung dengan serikat pekerja yang ada atau tidak, dan seberapa besar usaha yang dilakukan untuk mengalokasikan waktu untuk bekerja atau untuk hal-hal yang lain. Semua keputusan ini didorong oleh keinginan untuk mengoptimalkannya, yakni memilih yang terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia. Setiap pekerja selalu berusaha memaksimalkan seluruh keuntungan yang ada. Keputusan untuk menambah jutaan pekerja dampaknya akan menggerakkan penawaran tenaga kerja dalam perekonomian bukan hanya dari sisi jumlah orang yang akan memasuki pasar tenaga kerja tetapi juga dari sisi kuantitas dan kualitas keterampilan yang tersedia bagi para pengusaha yang mempekerjakan. Seorang pekerja yang ingin memaksimalkan kepuasannya, cenderung untuk menawarkan lebih banyak waktunya bagi pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif, seperti yang digambarkan pada Gambar 1.3.

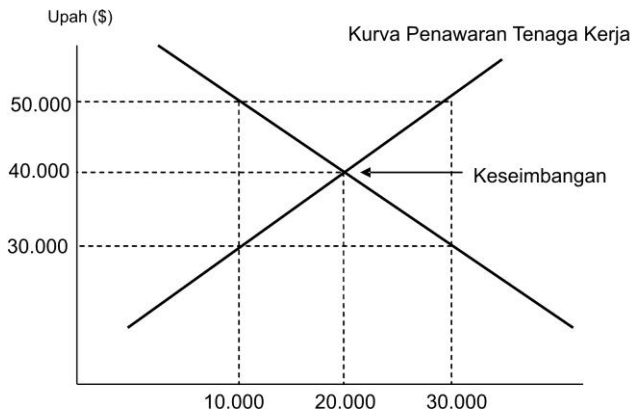
Kurva penawaran tenaga kerja hipotetis yang diilustrasikan dalam gambar menunjukkan jumlah teknisi yang diharapkan pada setiap tingkat upah. Sebagai contoh, 20.000 pekerja teknisi bersedia untuk menawarkan jasa mereka kepada perusahaan mesin jika upah teknisinya adalah \$40.000 per tahun. Jika upah meningkat menjadi \$50.000, maka 30.000 pekerja akan memilih bekerja dalam perusahaan mesin tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi upah teknisi, semakin besar jumlah pekerja yang akan memutuskan untuk beralih profesinya sebagai teknisi mesin, sebaliknya semakin kecil upah yang ditawarkan maka semakin berkurang pula jam kerja yang ditawarkannya. Secara umum, kurva penawaran tenaga kerja menghubungkan jumlah jam kerja yang ditawarkan dalam pasar tenaga kerja dengan upah yang ditawarkan.

Dari sisi perusahaan, setiap perusahaan akan berusaha memutuskan seberapa banyak pekerjaan dan jenis pekerja yang akan dipekerjakan ataupun dipecat, lamanya jam kerja yang dibutuhkan, seberapa besar jumlah modal yang digunakan, dan perlukah menawarkan kondisi pengamanan kerja bagi pekerjaannya atau tidak. Seperti halnya pekerja, perusahaan juga memiliki motifnya sendiri. Setiap perusahaan akan berusaha memaksimalkan keuntungannya. Dari sisi perusahaan, konsumen adalah raja. Perusahaan akan memaksimalkan keputusannya dengan membuat keputusan produksi, demikian pula dengan keputusan akan mempekerjakan ataukah memecat pekerja, yang kesemuanya ini didasarkan pada upaya pelayanan terbaik pada kebutuhan konsumen.

Keputusan menambah jumlah pekerja yang akan dipekerjakan atau dipecat membentuk permintaan jumlah pekerja dalam pasar kerja ekonomi secara keseluruhan. Implikasi dari perusahaan yang memaksimalkan keuntungan yakni perusahaan akan menambah jumlah pekerja yang dipekerjakan pada saat upah tenaga kerja murah, namun akan berhenti dari jumlah yang dipekerjakan pada saat upahnya mahal. Hubungan antara upah pekerja dan seberapa besar jumlah pekerja yang akan dipekerjakan diilustrasikan memiliki slope/kemiringan garis yang negatif (berhubungan terbalik) yang sering disebut sebagai kurva permintaan tenaga kerja (diilustrasikan dalam Gambar 1.3). Kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan bahwa perusahaan dalam industri permesinan akan mempekerjakan 20.000 teknisi ketika upah yang ditawarkan dalam pasar kerja adalah sebesar \$40.000, namun hanya akan mempekerjakan sebesar 10.000 teknisi jika upah yang ditawarkan meningkat menjadi \$50.000.

Para pekerja dan perusahaan oleh karenanya akan memasuki pasar tenaga kerja dengan kepentingan yang berbeda. Sebagian besar pekerja akan menawarkan jasanya lebih besar jika upah yang ditawarkan tinggi, namun hanya sedikit perusahaan yang akan mempekerjakannya. Sebaliknya, pekerja akan menawarkan jasanya lebih sedikit jika upah yang ditawarkan rendah, namun lebih banyak pekerja yang akan dipekerjakan oleh perusahaan. Perbedaan kepentingan dari pekerja yang mencari pekerjaan dan perusahaan yang mencari pekerja akan berhenti pada titik keseimbangan yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam perekonomian pasar bebas, keseimbangan akan terjadi pada saat penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya.

Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.3, upah keseimbangan terjadi pada \$40.000 dan jumlah pekerja yang dipekerjakan sebesar 20.000 orang dalam pasar tenaga kerja. Kombinasi upah dan kesempatan kerja ini mencapai keseimbangan karena mampu memenuhi keinginan dari pekerja dan perusahaan. Jika dimisalkan upah teknisi sebesar \$50.000, di atas keseimbangan, perusahaan hanya akan mempekerjakan teknisi sebanyak 10.000 orang, sementara ada 30.000 orang yang sedang mencari pekerjaan. Kelebihan jumlah pekerja yang menawarkan pekerjaan akan berdampak pada penurunan upah karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Sekarang, diasumsikan upahnya menjadi \$30.000, di bawah titik keseimbangan. Karena upah teknisinya sekarang murah, perusahaan bersedia untuk mempekerjakan sebanyak 30.000 pekerja, namun hanya 10.000 teknisi yang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah. Kondisi ini membuat perusahaan akan bersaing untuk mendapatkan jumlah teknisi yang tersedia, dan dampaknya akan meningkatkan tingkat upah.



Sumber: Simanjuntak, Payaman. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta

Gambar 1.3.
Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja dalam
Pasar Kerja Perusahaan Mesin

Dalam pasar tenaga kerja, peran pemerintah biasanya akan memberlakukan pajak pada pendapatan pekerja, memberikan subsidi untuk melatih teknisi, mengenakan pajak penghasilan pada perusahaan, meminta

kepada perusahaan mesin untuk mempekerjakan dua teknisi berkulit hitam untuk setiap teknisi yang berkulit putih (untuk alasan keadilan), mencegah transaksi ilegal pada pasar kerja (seperti, membayar teknisi kurang dari \$50.000 tiap tahun), dan menambah jumlah penawaran teknisi dengan meningkatkan imigrasi dari luar. Setiap peraturan pemerintah ini, pada gilirannya akan mengubah posisi keseimbangan dalam pasar kerja.

E. PENGANGGURAN (STUDI KASUS DI INDONESIA)

Setidaknya terdapat delapan paradoks masalah ketenagakerjaan dan migrasi di Indonesia (Shafiq, 2004). *Pertama*, penduduk semakin banyak bermigrasi ke perkotaan padahal perkotaan mempunyai tingkat pengangguran yang lebih tinggi daripada daerah yang lain. *Kedua*, angka pengangguran untuk generasi muda (mereka yang baru lulus sekolah) lebih tinggi daripada usia 30 tahun ke atas. *Ketiga*, angka pengangguran untuk wanita lebih tinggi daripada pria. *Keempat*, tingkat pengangguran untuk angkatan kerja dengan kapasitas pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan SD atau SLTP. *Kelima*, angka pengangguran untuk mereka yang bersekolah di sekolah umum lebih besar daripada mereka yang bersekolah di sekolah kejuruan. *Keenam*, semenjak tahun 1970 Indonesia menunjukkan performa ekonomi yang bagus namun hal itu ternyata tidak disertai dengan penyerapan angkatan kerja. *Ketujuh*, tidak ada perbedaan angka pengangguran antarmasyarakat dengan tingkat pendapatan yang berbeda. *Kedelapan*, angka pengangguran untuk daerah Sumatera Selatan, Aceh, Kalimantan Timur, NTT, Maluku dan Irian Jaya lebih besar daripada provinsi tetangganya NTB, Kalimantan Tengah dan Lampung tanpa ada penjelasan yang masuk akal.

Penyebab tingginya angka pengangguran di daerah perkotaan tersebut disebabkan oleh banyaknya migrasi masuk ke perkotaan, akibatnya timbul kesadaran bahwa di perkotaan pekerjaan lebih mudah didapatkan (Shafiq, 2004). Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3. semenjak tahun 1976 sampai dengan 1993 pengangguran di daerah perkotaan maupun pedesaan (total) masih berkisar 3% dari angkatan kerja. Jumlah ini bertambah di periode 1994 – 1997 (4,6%) kemudian bertambah lagi pada periode 1998 – 2000. Kenaikan tingkat pengangguran terjadi di medio 1990 – 1993 hingga 1994 – 1997 untuk perkotaan (5,7% ke 8,2%), sedangkan di pedesaan terjadi

kenaikan yang tidak terlalu besar (1,5% ke 2,9%). Implikasi dari fenomena tersebut adalah adanya penambahan penduduk yang masuk ke daerah perkotaan dan belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 1.3.
Tingkat Pengangguran Pria dan Wanita di Daerah Perkotaan dan Pedesaan 1976 - 2000 (% Angkatan Kerja)

	1976-79	1986-89	1990-93	1994-97	1998-00
Daerah Perkotaan	6,4	7,1	5,7	8,2	9,7
Lak-laki	7,0	6,8	5,3	7,2	9,0
Perempuan	5,0	7,8	6,5	10,0	10,7
Daerah Pedesaan	1,7	1,4	1,5	2,9	3,7
Laki-laki	2,0	1,4	1,4	2,4	3,4
Perempuan	1,2	1,4	1,7	3,5	4,2
Total	2,5	2,7	2,7	4,6	6,0
Laki-laki	2,9	2,8	2,5	4,1	5,6
Perempuan	1,7	2,7	2,9	5,6	6,6

Sumber: Dhanani, Shafiq, Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues, ILO.

Tabel 1.4.
Tingkat Pengangguran dan Komposisinya Menurut Umur

	Tingkat pengangguran (% angk kerja)					% Komposisi				
	76-79	86-89	90-93	94-97	98-00	76-79	86-89	90-93	94-97	98-00
Total	2,5	2,7	2,7	4,6	6,0	100	100	100	100	100
15-19	8,1	6,1	6,7	15,4	20,4	42,3	23,7	25,5	31,6	29,7
20-24	7,0	10,7	9,7	14,4	18,0	35,3	49,3	46,4	39,6	37,3
25-29	2,3	3,2	3,5	6,1	8,0	11,7	16,2	18,0	17,9	18,1
15-29	5,8	6,6	6,6	11,5	14,7	89,4	89,2	89,9	89,0	85,1
30+	0,4	0,5	0,4	0,8	1,4	10,6	10,8	10,8	11,0	14,9
Daerah Perkotaan	6,4	7,1	5,7	8,2	9,7	100	100	100	100	100
15-19	21,5	18,5	13,9	25,2	30,4	36,0	17,7	19,4	24,7	23,7
20-24	16,8	24,9	18,9	22,8	25,6	40,0	53,0	49,5	42,2	38,6
25-29	6,1	8,3	7,6	10,8	13,1	13,4	18,4	20,7	20,7	20,6
15-29	14,3	16,6	13,3	18,3	21,5	89,4	89,1	89,6	87,6	82,8
30+	1,1	1,2	1,0	1,7	2,6	10,6	10,9	10,4	12,4	17,2

	Tingkat pengangguran (% angk kerja)					% Komposisi				
	76-79	86-89	90-93	94-97	98-00	76-79	86-89	90-93	94-97	98-00
Daerah	1,7	1,4	1,5	2,9	3,7	100	100	100	100	100
Pedesaan										
15-19	6,1	4,0	4,7	11,6	15,7	46,7	32,7	34,4	41,6	39,2
20-24	4,7	5,3	5,4	9,0	11,8	32,0	43,7	41,8	35,8	35,3
25-29	1,5	1,3	1,6	3,1	4,2	10,6	12,8	14,2	13,7	14,2
15-29	4,1	3,4	3,8	7,6	10,0	89,2	89,2	90,4	91,1	88,7
30+	0,3	0,2	0,2	0,4	0,6	10,8	10,8	9,6	8,9	11,3

Sumber: Dhanani, Shafiq, Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues, ILO.

Tingkat pengangguran di kalangan usia 15 – 29 tahun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan usia 30 tahun ke atas. Tingginya angka pengangguran tersebut disebabkan faktor pergantian jenjang pendidikan, mengingat pada struktur usia tersebut masih dimungkinkan bagi penduduk usia itu untuk sekolah atau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Pergantian periode 1994 – 1997 ke 1998 – 2000 mencatat perubahan penting dalam struktur ketenagakerjaan, di daerah pedesaan angka pengangguran usia 25 – 29 menunjukkan pengurangan (20,7% menjadi 20,1%) sedangkan di daerah perkotaan angka pengangguran bertambah sekitar 0,02% (17,9% menjadi 18,1%). Angka tersebut dapat diartikan bahwa pengangguran dari desa (*rural*) sebagian terserap ke kota. Dengan kata lain, penduduk pada struktur usia 25 – 29 yang mempunyai kemampuan mobilitas yang tinggi cenderung pindah ke kota untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik.

Tingkat pengangguran bagi kaum wanita menunjukkan pola yang menaik. Semenjak tahun 1976 sampai 2000 (lihat Tabel 1.5), proporsi pengangguran dari kaum wanita terhadap angkatan kerja meningkat. Peningkatan yang tajam terjadi di medio 1994 – 1997 (5,6%) padahal periode sebelumnya (1976 – 1993) mencatat tingkat pengangguran bagi kaum wanita hanya berkisar 1,7% sampai dengan 2,9% dari angkatan kerja. Apabila dilihat dari proporsi angkatan kerja wanita yang menganggur terhadap populasi juga ditemui fenomena yang serupa. Pada tahun 1997 – 2000 terdapat 2,8 persen wanita dalam populasi berada dalam keadaan menganggur sedangkan peningkatan pada periode sebelumnya hanya berkisar 0,1 persen sampai 0,7 persen. Krisis ekonomi yang terjadi di pertengahan tahun 1997 merupakan penyebabnya, saat itu rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika membuat harga barang di dalam negeri (Indonesia) naik. Saat itu bertepatan

dengan jadwal pembayaran cicilan utang luar negeri baik swasta maupun pemerintah. Keadaan ini memaksa perusahaan untuk melikuidasi sebagian aset mereka dan berakhir pada PHK beberapa karyawan.

Tabel 1.5.
Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin

	76-79	86-89	90-93	94-97	98-00
<u>Prosentase terhadap angkatan kerja</u>	2,5	2,7	2,7	4,6	6,0
Laki-laki	2,9	2,8	2,5	4,1	5,6
Perempuan	1,7	2,7	2,9	5,6	6,6
<u>Prosentase terhadap populasi</u>	1,5	1,8	1,8	3,1	4,0
Laki-laki	2,1	2,3	2,1	3,4	4,7
Perempuan	0,7	1,4	1,5	2,8	3,4
<u>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)</u>	58,8	66,5	66,1	66,7	67,3
Laki-laki	73,4	82,0	82,7	83,5	83,6
Perempuan	42,7	51,7	50,0	50,5	51,3

Sumber: Dhanani, Shafiq, Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues, ILO.

Semenjak tahun 1976 – 2000 angkatan kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi (perguruan tinggi) relatif sulit mendapatkan pekerjaan (lihat Tabel 1.6). Pada penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah (SD) cenderung lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Penyebabnya antara lain; untuk penduduk dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung “memilih” pekerjaan, sedangkan jumlah pekerjaan dengan spesifikasi yang diinginkan tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Berbeda dengan pencari kerja yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, mereka cenderung tidak “memilih” pekerjaan. Hal itu menyebabkan *marginal rates of substitution* pekerja dengan karakteristik tersebut besar.

Tabel 1.6.
Tingkat Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

	Tingkat pengangguran (% angk kerja)					% Komposisi				
	76-79	86-89	90-93	94-97	98-00	76-79	86-89	90-93	94-97	98-00
<u>15-19</u>	19,9	18,5	13,9	26,0	29,8	100	100	100	100	100
Tidak Lulus SD	13,5	7,8	6,6	9,8	13,2	31	7	6	3	3
Lulus SD	21,3	11,6	8,1	14,6	17,4	42	29	28	21	20
Lulus SMP	31,5	19,7	12,9	20,9	24,1	17	26	27	24	26
Lulus SMA	60,1	63,2	47,5	56,4	66,4	5	27	26	30	26
Lulus Kejuruan	46,0	63,2	44,6	56,9	62,7	4	10	13	21	24
<u>20-24</u>	15,5	24,9	18,9	23,0	26,6	100	100	100	100	100
Tidak Lulus SD	7,6	6,2	4,7	7,0	11,0	12	3	2	1	2
Lulus SD	12,0	8,6	5,3	7,8	10,9	23	8	6	7	8
Lulus SMP	20,5	18,3	12,6	14,8	19,1	22	12	13	12	14
Lulus SMA	30,3	42,1	30,9	32,9	36,6	19	51	51	47	43
Lulus Kejuruan	27,5	33,3	25,4	29,6	33,5	22	22	23	24	25
Lulus Sarjana	30,2	37,9	34,2	38,8	43,4	2	4	6	8	9
<u>25-29</u>	5,7	8,3	7,6	11,2	13,3	100	100	100	100	100
Tidak Lulus SD	3,4	2,9	2,0	3,1	5,9	14	5	3	2	2
Lulus SD	4,3	3,5	2,1	3,8	5,8	21	12	7	7	9
Lulus SMP	7,6	7,3	5,0	6,9	8,6	24	13	10	11	12
Lulus SMA	8,3	13,3	11,7	14,0	16,1	20	30	38	37	36
Lulus Kejuruan	5,7	10,1	8,5	11,9	14,0	12	19	16	15	14
Lulus Sarjana	12,4	19,6	19,9	23,6	25,2	8	20	25	29	27
<u>Semua Kel</u>	6,2	7,1	5,7	8,5	9,9	100	100	100	100	100
<u>Umur</u>										
Tidak Lulus SD	3,4	1,8	1,2	1,8	2,3	22	6	4	3	3
Lulus SD	6,6	3,6	2,5	3,9	4,8	30	15	12	12	13
Lulus SMP	8,8	7,0	5,4	7,6	9,2	20	15	15	15	16
Lulus SMA	10,7	18,6	13,7	15,9	16,5	13	39	40	38	35
Lulus Kejuruan	11,4	12,0	9,3	13,9	17,1	13	18	18	19	20
Lulus Sarjana	4,3	9,2	8,7	11,8	12,9	2	7	10	12	12

Sumber: Dhanani, Shafiq, Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues, ILO.

Tabel 1.7.
Tingkat Pengangguran Antara Lulusan Sekolah Umum dengan Kejuruan

	Prosentase terhadap angkatan kerja					Persentase terhadap populasi				
	76-79	86-89	90-93	94-97	98-00	76-79	86-89	90-93	94-97	98-00
15-19										
Umum	60,1	63,2	47,5	56,4	55,4	13,1	16,3	13,6	21,0	19,9
Kejuruan	46,0	53,2	44,8	56,9	62,7	18,3	23,2	23,6	37,1	40,3
20-24										
Umum	30,3	42,1	30,9	32,9	35,6	18,3	23,4	17,6	22,6	26,2
Kejuruan	27,5	33,3	25,4	29,6	33,5	18,0	24,9	23,2	28,3	33,6
25-29										
Umum	8,3	13,3	11,7	14,0	16,1	5,5	8,8	6,8	9,3	10,9
Kejuruan	5,7	10,1	8,5	11,9	14,0	8,9	16,5	16,5	20,4	22,2
Semua kel umur										
Umum	10,7	18,6	13,7	15,9	16,5	6,2	10,4	7,8	10,0	10,3
Kejuruan	11,4	12,0	9,3	13,9	17,1	8,3	9,3	7,1	10,8	13,2

Sumber: Dhanani, Shafiq, Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues, ILO.

Pasar kerja tidak membedakan antara pekerja yang lulus dari Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pengangguran pada penduduk dengan latar belakang pendidikan SMU cenderung lebih tinggi daripada penduduk yang berlatar belakang pendidikan SMK. Hal ini disebabkan oleh lulusan SMU memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi) setelah dia lulus sekolah namun lulusan dari SMK memilih untuk bekerja dibanding sekolah lagi.

Paradoks ketenagakerjaan yang lain, berupa pertumbuhan ekonomi yang tidak membawa pertumbuhan yang berarti bagi jumlah pengangguran. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak pertengahan tahun 1970 sebesar 7 – 8 persen per tahun tidak membawa perubahan yang berarti bagi tingkat pengangguran. Pada periode awal (1976 – 1979 dan 1986 – 1989) tingkat pengangguran mengalami pertumbuhan sebesar 2,5 hingga 2,7 persen per tahun. Setelah itu, naik tajam hingga mencapai nilai 4,6 persen per tahun untuk periode 1994 – 1997. Fenomena ini membuktikan pembangunan di Indonesia yang tidak kondusif bagi angkatan kerja.

Tabel 1.8.
Perubahan Komposisi Usia Kerja

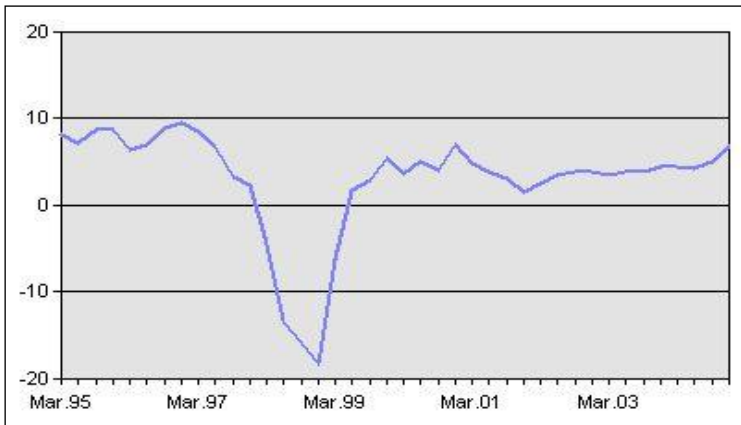
	1976-79	1986-89	1990-93	1994-97	1998-00
Angkatan Kerja	100	100	100	100	100
Kota	16	23	28	34	38
Desa	84	77	72	66	62
Laki-laki	66	61	61	61	61
Perempuan	34	39	39	39	39
%15-29, SMP ke atas	21	40	42	50	51
%15-29, SMP ke bawah	79	60	58	50	49
<u>Tingkat pengangguran</u>					
<u>Laki-laki</u>					
15-19	2.9	2.8	2.5	4.1	5.6
20-24	9.5	5.9	6.2	14.2	18.7
25-29	8.0	11.4	9.9	13.6	17.8
30+	2.8	3.6	3.4	5.3	7.6
30+	0.5	0.5	0.4	0.7	1.4
<u>Perempuan</u>					
15-19	1.7	2.7	2.9	5.6	6.6
20-24	5.8	6.4	7.4	17.2	22.9
25-29	4.9	9.8	9.7	15.6	18.2
30+	1.3	2.6	3.6	7.4	8.5
30+	0.3	0.4	0.4	0.9	1.3
<u>Tingkat pengangguran</u>					
<u>Laki-laki</u>					
15-19	71.7	79.7	80.6	80.1	79.0
20-24	54.1	43.6	44.5	39.6	35.8
25-29	80.8	69.0	70.8	70.7	67.6
30+	94.2	91.1	90.5	89.7	87.5
30+	70.5	91.0	91.1	91.0	90.7
<u>Perempuan</u>					
15-19	41.9	50.3	48.6	47.7	48.0
20-24	32.8	33.5	32.7	29.3	25.6
25-29	35.6	46.2	43.9	43.1	42.3
30+	42.1	53.8	50.3	48.2	48.2
30+	46.2	55.4	53.7	53.4	54.7

Keterangan:

1. Tingkat pengangguran merupakan persentase dari angkatan kerja
2. Tingkat kesempatan kerja merupakan persentase dari populasi

Sumber: Dhanani, Shafiq, Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues, ILO.

Pergeseran struktur pekerja mulai tampak di periode 1976 – 1979 dan 1990 – 1993 (lihat Tabel 1.8). Terjadi penurunan proporsi pekerja laki-laki sebesar 2,9% sampai 2,5%, sedangkan pekerja wanita mengalami kenaikan (1,7% sampai 2,9%). Apabila pekerja wanita dibayar lebih rendah daripada pekerja laki-laki maka hal ini akan menimbulkan penurunan kapasitas perekonomian (lihat Gambar 1.4.).



Sumber: Bank Indonesia, www.bi.go.id/biweb/Templates/Dynamic

Gambar 1.4.
Pertumbuhan Ekonomi

Distribusi pengeluaran pada Tabel 1.9. membagi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan ke dalam lima kelompok (*quantile*) berdasarkan tingkat pengeluarannya. *Quantile* tersebut dapat dibaca sebagai urutan tingkat pendapatan penduduk dari tingkat paling rendah (Q1) sampai dengan tingkat paling tinggi (Q5). Tipikal penganggur di Indonesia berasal dari keluarga yang tidak sejahtera, sehingga hal itu menyebabkan angkatan kerja merasa takut untuk menganggur. Secara empiris untuk laki-laki, nampaknya tidak terdapat perbedaan yang mencolok antara pengangguran dari masyarakat dengan tingkat pengeluaran yang tinggi dengan masyarakat dengan tingkat pengeluaran rendah. Perbedaan tersebut muncul untuk angkatan kerja wanita, semakin tinggi tingkat pengeluaran maka resistensi kaum wanita untuk bekerja semakin besar.

Tabel 1.9.
Tingkat Pengangguran Menurut Distribusi Pengeluaran

Rp. 000/kapita/bulan (% dari total)	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	total
<u>Laki-laki</u>						
1997	3,2	3,9	4,5	4,9	5,3	4,3
1999	4,7	5,9	5,7	6,6	6,3	5,8
<u>Perempuan</u>						
1997	4,7	5,8	7,1	8,3	8,1	6,6
1999	6,7	7,1	7,6	8,6	7,8	7,5
<u>Laki-laki & Perempuan</u>						
1997	3,7	4,6	5,4	6,1	6,3	5,1
1999	5,4	6,3	6,4	7,3	6,9	6,4

Sumber: Dhanani, Shafiq, Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues, ILO.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai karakteristik perekonomian yang berbeda, misalnya daerah Bali dan Nusa Tenggara yang mempunyai tingkat pendapatan per kapita paling kecil yaitu Rp365.000,00/tahun (lihat Tabel 1.10.) namun tingkat penganggurannya juga yang paling kecil (3,6%). Salah satu sebab dari rendahnya tingkat pengangguran dan pendapatan per kapita di Bali dan Nusa Tenggara adalah sebagian besar (setelah sektor formal) tenaga kerja terserap di sektor perdagangan. Sebagai daerah wisata, Bali dan Nusa Tenggara mempunyai banyak permintaan untuk tenaga kerja di sektor wisata. Sektor ini adalah bagian dari perekonomian yang berkaitan erat dengan sisi perdagangan (wiraswasta). Implikasi dari fenomena itu membawa struktur ekonomi Bali dan Nusa Tenggara ke arah fluktuasi siklus bisnis sektor pariwisata. Berbeda dengan daerah Jawa yang mempunyai tingkat pengangguran dan tingkat pendapatan per kapita yang relatif seimbang. Keseimbangan ini dapat diartikan bahwa antara tingkat pengangguran dan pendapatan per kapita di Jawa dipengaruhi oleh sektor perekonomian yang cenderung konstan. Hal ini dibuktikan dengan persentase yang besar tenaga kerja di sektor formal atau menjadi pegawai upahan (*wage employment*).

Tabel 1.10.
Kontribusi Daerah Dalam Pengangguran Periode 1990 - 1993

	Pulau						Indonesia
	Sumatra	Jawa	Bali-NT	Kalimantan	Sulawesi	Maluku-Irian	
Tingkat Pengangguran	6,9	5,5	3,6	5,2	7,4	8,8	5,7
GDP/capita (Rp. 000/tahun)	538	605	365	771	438	581	571
Pertumbuhan rata-rata GDP 90-93	7,0	7,6	8,3	6,8	8,4	12,1	7,6
% Usia 15-29							
Populasi usia 10 +	40,6	38,7	40,9	40,3	41,3	44,1	39,3
Yang Lulus SMA	22,6	19,8	18,8	21,6	23,8	28,5	20,6
% dari total kesempatan kerja							
Upah kesempatan kerja	52,2	56,2	45,2	47,9	47,2	59,4	54,4
Pertanian	12,1	9,7	15,3	9,3	12,3	9,2	10,4
Perdagangan	28,8	28,4	30,2	29,5	30,9	27,8	28,7
Jasa	31,0	28,5	29,5	30,9	34,4	45,8	29,5

Sumber: Dhanani, Shafiq, Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues, ILO.

Fenomena yang hampir serupa ditunjukkan di daerah Kalimantan. Sebagai daerah dengan struktur topologi tanah yang ditumbuhi oleh hutan, daerah ini mencatat penyerapan tenaga kerja yang kecil untuk sektor pertanian (9,3%). Penyebaran tenaga kerja yang hampir merata terjadi di sektor jasa (30,9%), perdagangan (27,9%) serta sektor formal (47,9%). Satu hal yang perlu dicatat adalah Jawa, Bali-Nusa Tenggara dan Kalimantan mempunyai tingkat pengangguran di bawah tingkat pengangguran rata-rata (Indonesia). Sementara itu, Sumatera, Sulawesi serta Maluku-Irian Jaya mempunyai tingkat pengangguran di atas tingkat pengangguran Indonesia.

Di daerah Sumatra, tingkat pengangguran berada pada titik 6,9% dengan proporsi tenaga kerja yang relatif lebih besar dibandingkan daerah dengan

tingkat pengangguran di bawah rata-rata yaitu sebesar 12,1%. Proporsi tenaga kerja di sektor formal berkisar pada angka 52,2%, sektor perdagangan sebesar 28,8% dan sektor jasa sebesar 31%. Daerah Sulawesi menunjukkan fenomena yang sama, yaitu karakteristik tenaga kerja di sektor pertanian yang lebih besar dibandingkan daerah yang lain. Persebaran di sektor formal, perdagangan dan jasa mempunyai pola yang sama juga. Persamaan antara Sumatera dan Sulawesi tidak terjadi di daerah Maluku-Irian Jaya, daerah ini mempunyai konsentrasi tenaga kerja di sektor formal yang besar. Proporsi terbesar kedua berada di sektor jasa kemudian perdagangan dan pertanian.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Pengangguran struktural disebabkan oleh adanya perubahan dalam struktur perekonomian, jelaskan mengapa terjadi hal yang demikian!
- 2) Jelaskan keputusan perusahaan dalam pasar kerja yang berhubungan dengan permintaan tenaga kerja!
- 3) Jelaskan fenomena penganggur di Indonesia lebih besar pada struktur usia muda!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Perubahan struktur perekonomian menyebabkan terjadinya perubahan dalam iklim berusaha sehingga struktur lapangan kerja juga berubah. Misalnya sebelumnya berkembangnya teknologi maju, keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan tidak terlalu tinggi dan mungkin banyak yang dikerjakan secara manual. Namun setelah digunakannya teknologi maju, tenaga kerja yang dibutuhkan harus mempunyai keterampilan yang sesuai dengan teknologi tersebut. Dan kenyataannya tenaga kerja tidak mampu menyesuaikan secara cepat. Untuk memenuhi kondisi ini tidak mudah, diperlukan biaya yang tinggi dan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, tenaga kerja yang tidak terserap dalam struktur yang baru tergolong dalam pengangguran struktural.

- 2) Motif perusahaan dalam mencari pekerja tidak lepas dari besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Jadi perusahaan mempunyai wewenang dalam memutuskan jumlah tenaga kerja yang akan digunakan, jenis kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan yang tentunya disesuaikan dengan teknologi yang digunakan dan bidang usahanya. Pada prinsipnya pengusaha akan berusaha memenuhi kebutuhan konsumennya. Apabila konsumen menginginkan suatu barang, maka perusahaan akan mencari pekerja yang dapat memproduksi barang tersebut. Demi keuntungan yang akan diperoleh, maka pengusaha akan menggunakan banyak tenaga kerja pada saat upahnya murah dan sebaliknya.
- 3) Pengangguran pada struktur usia muda (15 – 29 tahun) memang lebih tinggi. Hal ini karena dalam umur tersebut mereka cenderung dalam masa sekolah dan masih dimungkinkan untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sedang pada usia > 30 tahun mereka sudah menyelesaikan pendidikannya dan sudah stabil dalam pekerjaannya. Dengan berkembangnya teknologi maka diperlukan sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.



RANGKUMAN

1. Perbedaan kepentingan dari pekerja yang mencari pekerjaan dan perusahaan yang mencari pekerja akan berhenti pada titik keseimbangan yang memuaskan kedua belah pihak. Dalam perekonomian pasar bebas, keseimbangan akan terjadi pada saat penawaran tenaga kerja sama dengan permintaannya.
2. Dalam pasar tenaga kerja, peran pemerintah biasanya akan memberlakukan pajak pada pendapatan pekerja, memberikan subsidi untuk melatih teknisi, mengenakan pajak penghasilan pada perusahaan, meminta kepada perusahaan mesin untuk mempekerjakan dua teknisi berkulit hitam untuk setiap teknisi yang berkulit putih (untuk alasan keadilan), mencegah transaksi ilegal pada pasar kerja (seperti, membayar teknisi kurang dari \$50.000 tiap tahun), dan menambah jumlah penawaran teknisi dengan meningkatkan imigrasi dari luar.
3. Menurut sebab terjadinya, pengangguran dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu pengangguran friksional, struktural dan musiman

**TES FORMATIF 2**

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Perbedaan fenomena angkatan kerja yang tergolong pengangguran di Indonesia dengan negara berkembang lainnya adalah
 - A. lebih terfokus pada mencari pekerjaan
 - B. akibat perubahan struktur ekonomi
 - C. karena kenaikan harga barang dan jasa
 - D. akibat migrasi penduduk negara lain

- 2) Salah satu penyebab terjadinya pengangguran friksional adalah ...
 - A. jam kerja yang berlebih
 - B. kemampuan yang kurang
 - C. kurangnya informasi
 - D. karena diskriminasi upah

- 3) Tenaga kerja yang bekerja hanya pada saat liburan sekolah sebagai pemandu wisata tergolong ke dalam pengangguran
 - A. struktural
 - B. musiman
 - C. penuh
 - D. berkala

- 4) Tingginya tingkat pengangguran di daerah perkotaan di Indonesia disebabkan oleh
 - A. konsentrasi perekonomian
 - B. kesejahteraan yang baik
 - C. biaya hidup yang tinggi
 - D. besarnya migrasi

- 5) Salah satu fenomena pengangguran di Indonesia adalah
 - A. lebih tinggi di daerah pedesaan
 - B. disebabkan upah yang rendah
 - C. lebih banyak generasi muda
 - D. banyak berpendidikan rendah

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{5} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) B
- 2) A
- 3) D
- 4) A
- 5) D

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) C
- 3) B
- 4) D
- 5) C

Daftar Pustaka

_____, *Indonesia Fact Sheet*. Australia

Borjas, George J. (2000). *Labor Economics*, 2nd edition. McGraw Hill.

Carrington, William J. (1996). *The Alaskan Labor Market During Pipeline Era*. Journal Of Political Economy, February 1996.

Dhanani, Shafiq, (2004). *Unemployment and Underemployment in Indonesia, 1976-2000: Paradoxes and Issues*. International Labour Organizations (ILO).

Mankiw, N. Gregory. (2003). *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*. (terjemahan). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Simanjuntak Payaman. (1998). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Todaro, Michael. P. (1997). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Keenam*. (terjemahan), Jakarta: Penerbit Erlangga.

www.swlearning.com (13 Mei 2005; 18:25 WIB)

www.bi.go.id (14 Mei 2005; 19:30 WIB)